

**PENYULUHAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI MELALUI MEDIA FILM
ANIMASI “SAHABAT PEMBERANI” DI SD NEGERI GEDONGKIWO
YOGYAKARTA**

LAPORAN AKHIR PKM TEMATIK (PERORANGAN)



**Esty Rahmayanti, S.Pd., M.Pd.
NIP 199111142019032022/NIDN 0014119105**

**INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA
MEI 2022**

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Analisis Situasi	1
B. Permasalahan Mitra.....	1
BAB II METODOLOGI	7
A. Solusi yang ditawarkan	7
B. Target Luaran	9
BAB III KELAYAKAN PENGUSUL	10
BAB IV RANCANGAN KEGIATAN.....	13
A. Jadwal Pelaksanaan.....	17
B. Biaya Pekerjaan	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Korupsi merupakan salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia pada saat ini. Hal ini disebabkan semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin sulit untuk diatasi, korupsi tentu saja sangat merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Perbuatan korupsi merupakan bahaya *latent* yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Korupsi merupakan sebuah kejahatan moral yang bukan hanya akan menyengsarakan rakyat namun juga akan mencoreng harkat dan martabat bangsa Indonesia. Korupsi adalah kekuatan jahat yang mampu menghancurkan suatu bangsa. Hingga akhir 2014, Indonesia masih mengalami korupsi yang relatif tinggi (Ermansjah Djaja, 2013).¹

Korupsi dapat diartikan sebuah bentuk tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi. Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang yang dilakukan secara individual ataupun kolektif untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara (Chablullah Wibisono, 2011).²

Malthuf Siroj dan Ismail Marjuki (2018)³ mengatakan lebih jauh korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*). Dikatakan demikian, karena secara operasional, korupsi sering kali dilakukan secara tertutup, rahasia, menggunakan sarana teknologi canggih dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, tidak keliru jika kemudian praktik korupsi disebut identik dengan praktik narkoba maupun terorisme yang dalam aturan yuridis disebut juga *ekstraordinary crime*. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya juga harus dilakukan dengan usaha yang luar biasa.

¹ Ermansjah Djaja. 2013. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta : Sinar Grafika.

² Chablullah, Wibisono. 2011. *Memberantas Korupsi dari dalam Diri*. Jakarta: Al Wasat Publishing House.

³ Siroj Malthuf, Marjuki Ismail. *Pendidikan AntiKorupsi*. Malang: Media Madani, 2018.

Korupsi semakin merajalela dengan melibatkan pelaku yang beragam, mulai dari pusat sampai pada level terendah. Dari data Transparency International (TI), Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2017 berada di skor 37 dan berada pada peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei secara global. Mengambil dari pernyataan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) bahwasannya kerugian negara yang timbul dari kasus korupsi pada semester I 2018 sebesar Rp1,09 triliun dan nilai suap Rp. 42,1 miliar. Menurut Erika Refida (2003) dalam penelitiannya menemukan bahwa penyebab terjadinya korupsi adalah kelemahan moral (41,3%), tekanan ekonomi (32,8%), hambatan struktur administrasi (17,2%) dan hambatan struktur sosial (7,08%).

Menyikapi fenomena korupsi yang semakin marak terjadi, dunia pendidikan harus melakukan pembenahan untuk menjawab tantangan derasnya arus korupsi. Lembaga pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam menanamkan mental antikorupsi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat (Muhammad Nurdin, 2014:178).⁴

Wibowo (2013:38)⁵ menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Pendidikan antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter, nilai antikorupsi dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi. Pendidikan antikorupsi juga merupakan instrumen untuk mengembangkan kemampuan belajar dalam menangkap konfigurasi masalah dan kesulitan persoalan kebangsaan yang memicu terjadinya korupsi, dampak, pencegahan dan penyelesaiannya.

⁴ Muhammad Nurdin. 2014. *Pendidikan Antikorupsi (strategi internalisasi nilai-nilai Islami dalam menumbuhkan kesadaran antikorupsi di sekolah)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

⁵ Wibowo, Agus. 2013. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai antikorupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Pendidikan antikorupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada siswa. Pendidikan tersebut memerlukan tahap penalaran, internalisasi nilai dan moral, sehingga mata pelajarannya didesain tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, melainkan lebih pada aspek afektif dan psikomotorik. Pendidikan antikorupsi bukan sekedar media transfer pengalihan pengetahuan (kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Melalui pendidikan antikorupsi yang terarah dan efektif, terbuka kemungkinan internalisasi nilai-nilai pada diri siswa, karena masa depan bangsa dan negara Indonesia ini ada di tangan generasi muda. Generasi muda merupakan agen perubahan (*agent of change*) sebagai penentu perkembangan ataupun kemunduran suatu bangsa dan negara.

Peran guru, orang tua, dan orang-orang di sekitar sangat penting, mereka harus memberikan teladan berperilaku antikorupsi, terutama berperilaku jujur sebagai dasar pembentukan karakter secara dini. Hal yang harus dihindari dalam pendidikan anti korupsi adalah adanya indoktrinasi, pembelajaran yang menekankan pada aspek hafalan semata. Pendidikan antikorupsi harus bermakna belajar dengan mengalami atau *experiential learning* yang tidak sekedar mengkondisikan para siswa hanya untuk mengetahui, namun juga diberi kesempatan untuk membuat keputusan dan pilihan untuk dirinya sendiri.

Program pendidikan antikorupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama dan terpadu serta terbimbing dalam rangka menekan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Kemudian harapannya berdampak pada adanya respon atau tanggapan balik dari rakyat untuk bisa menyuarakan kearifannya mengenai penyimpangan korupsi. Masyarakat terdidik inilah yang nantinya memiliki peranan yang cukup dominan dalam masyarakat. Pendidikan anti korupsi diharapkan mampu membentuk kesadaran publik terhadap kegiatan yang mengarah ke tindakan korupsi, memberikan bekal pemahaman mengenai

efek tindak korupsi bagi kehidupan bangsa dan negara, serta mampu memberikan pemahaman penggunaan ilmu pengetahuan dengan cara-cara yang benar tanpa ikut andil dalam tindakan korupsi. Penanaman mental antikorupsi sejak usia dini diharapkan dapat melahirkan generasi penerus yang siap berperang melawan korupsi. Melalui Pendidikan antikorupsi juga diharapkan munculnya rasa tanggung jawab untuk memberantas korupsi dan memberikan contoh pada masyarakat luas tidak hanya dari tuturan, tetapi juga melalui perbuatan yang mencerminkan karakter yang ulet, jujur, toleran, dan lain sebagainya.

Selama ini upaya pemberantasan korupsi hanya fokus pada upaya menindak para koruptor (upaya represif), tetapi sedikit sekali perhatian pada upaya pencegahan korupsi (upaya preventif). Pendidikan anti korupsi merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk generasi muda, melalui 3 jalur, yaitu: 1) pendidikan di sekolah yang disebut dengan pendidikan formal, 2) pendidikan di lingkungan keluarga yang disebut dengan pendidikan informal, dan 3) pendidikan di masyarakat yang disebut dengan pendidikan nonformal. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi harus ditanamkan, dihayati, diamalkan setiap insan Indonesia sejak usia dini sampai perguruan tinggi, bila perlu *long life education*, artinya nilai-nilai pendidikan anti korupsi menjadi nafas di setiap waktu, setiap tempat semasa masih hidup.

Generasi muda adalah tulang punggung bangsa, tongkat estafet dalam pembangunan nasional, termasuk siswa siswi di SD Negeri Gedongkiwo Yogyakarta. Namun berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan salah satu guru di SD Negeri Gedongkiwo Yogyakarta permasalahan yang masih terjadi adalah masih ada siswa sengaja telat masuk sekolah, atau sengaja izin untuk meninggalkan sekolah dengan alasan yang tak penting atau membolos. Kemudian pada saat ujian tidak mengerjakan sendiri atau menyontek pekerjaan teman. Oleh sebab itu diperlukan peranan mereka yang lebih besar, untuk menghindari tindakan-tindakan koruptif yang menjadi dasar berkembangnya tindakan korupsi. Pemahaman tentang tindakan korupsi mendorong adanya penyuluhan guna pencegahan tindakan korupsi baik di kalangan masyarakat umum maupun negara. Tindakan pencegahan yang dimaksud hendaknya dilakukan sejak dini, karena peran generasi muda yang akan meneruskan tonggak kedaulatan bangsa haruslah

memiliki rasa cinta tanah air serta tertanam nya nilai-nilai kejujuran yang luhur yang dapat membawa pada perubahan dan era baru bebas korupsi.

Pengabdian kepada masyarakat ini menjadikan siswa sebagai subjek pengabdian karena mereka adalah calon orang *white collar*, orang-orang yang berpendidikan baik yang ada di jabatan-jabatan strategis, dan siswa sekolah dasar merupakan calon orang yang akan kerja pada posisi-posisi strategis yang rentan melakukan tindak pidana korupsi nantinya. Penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis mulai dari pendidikan informal keluarga di rumah, pendidikan formal di sekolah, dan pendidikan nonformal di masyarakat dapat mencegah, mengurangi dan bahkan memberantas korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya.

Supaya kegiatan penyuluhan menjadi semakin menarik diperlukan media untuk menyampaikan pesan, salah satunya adalah film. Film tidak hanya menjadi alternatif hiburan semata, melainkan tersirat suatu ideologi didalamnya yang berimplikasi perubahan sikap, perilaku, dan pemikiran penonton. Film merupakan refleksi dari gambar yang bergerak dan bersuara memiliki keunggulan dalam penerapannya pada pembelajaran di kelas yaitu dapat membantu siswa dalam memahami dan merasakan keadaan yang sebenarnya dari sebuah kehidupan. Film adalah media yang paling efektif dalam upaya pembelajaran masyarakat. Salah satu film yang terkandung makna penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi adalah film animasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Deputi Pencegahan KPK Isman Elmi mengatakan film bergenre animasi tersebut lebih menasar anak-anak. Film produksi KPK ini dalam rangka pencegahan korupsi melalui pembangunan karakter anak Indonesia yang berintegritas. Melalui film ini, KPK ingin anak-anak Indonesia memiliki karakter berani jujur, disiplin, dan berani bertanggung jawab. Film animasi merupakan suatu instrumen yang dapat memberikan kesan di dalam memori anak. Dengan ilustrasi yang sedikit lucu diharapkan memberikan pesan terus menerus yang mudah diingat. Tujuannya untuk mencegah korupsi sejak dini, dimulai dari anak-anak dengan membangun perilaku jujur. Film ini bagaimana kita membangun kebudayaan. Apabila korupsi sudah menjadi budaya, maka lawanya juga harus melalui kebudayaan.

Media film efektif untuk menyebarluaskan pesan anti korupsi. Film ini diharapkan menjadi media yang mengedukasi siswa supaya dapat menghindari diri dari korupsi. Oleh karena itu diperlukan penyuluhan untuk merubah paradigma masyarakat dari hal yang terkecil akan pentingnya kesadaran untuk tidak melakukan tindakan korupsi atau mencegah dari dini, bibit-bibit menjadi korupsi. Berdasarkan alasan tersebut maka kami tim pengabdian bergerak untuk mengambil bagian bergabung dengan kekuatan bangsa mengadakan penyuluhan untuk mencegah korupsi sejak dini dengan judul pengabdian masyarakat ***Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi melalui Media Film “Sahabat Pemberani” di SD Negeri Gedongkiwo Yogyakarta.***

b. Permasalahan Mitra

Selama ini bentuk korupsi yang diketahui hanya seperti penyuapan, penggelapan dan nepotisme saja, namun tanpa disadari, ada banyak bentuk korupsi yang terjadi, salah satunya adalah di lingkungan sekolah, seperti korupsi waktu. Permasalahan yang masih terjadi di SD Negeri Gedongkiwo Yogyakarta adalah masih ada siswa sengaja telat masuk sekolah, atau sengaja izin untuk meninggalkan sekolah dengan alasan yang tak penting atau membolos. Kemudian pada saat ujian tidak mengerjakan sendiri atau menyontek pekerjaan teman.

Keterlibatan pendidikan formal seperti SD N Gedongkiwo Yogyakarta dalam upaya pencegahan korupsi memiliki kedudukan yang sangat strategis. Sekolah adalah agen perubahan sosial yang bertugas mengenalkan nilai-nilai baru kepada siswa dalam banyak hal, termasuk masalah korupsi. SD Negeri Gedongkiwo Yogyakarta memiliki peran dan posisi yang strategis untuk menjadi *agen of change* di tengah-tengah masyarakat dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi. Oleh karena itu diperlukan penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi melalui media film yang dipandu oleh tim pengabdian. Melalui kegiatan ini paling tidak dapat mensosialisasikan program pemerintah mengenai keterlibatan *civil society* dalam pencegahan korupsi di tingkat lokal, karena upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai pendidikan antikorupsi adalah: 1) membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan

dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi, 2) menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter teladan agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini, sehingga kegiatan penyuluhan pendidikan antikorupsi menjadi penting diberikan sebagai salah satu upaya preventif dalam pencegahan korupsi sejak dini.



BAB II

METODOLOGI

a. Solusi yang ditawarkan

Sasaran pengabdian kepada masyarakat adalah siswa sekolah dasar. Kami melakukan penyuluhan dengan melibatkan siswa di SD Negeri Gedongkiwo Yogyakarta. Tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat secara garis besar dimulai dari : (1) Pengambilan Data Awal, (2) Kegiatan Pengabdian Masyarakat penyuluhan pendidikan antikorupsi melalui Media Film, (3) Evaluasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Adapun untuk rencana kegiatan, langkah awal yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini adalah melakukan koordinasi tim untuk menyamakan persepsi kegiatan dan pembagian tugas antara lain mengurus perizinan kemudian survai lapangan dan koordinasi dengan sekolah. Langkah berikutnya yaitu penyusunan materi penyuluhan pendidikan antikorupsi dan mempersiapkan alat dan bahan. Langkah inti yakni memberikan penyuluhan Pendidikan antikorupsi melalui media film dan diskusi.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam dunia pendidikan terkait upaya preventif melawan korupsi menurut Malthuf Siroj dan Ismail Marjuki (2018)⁶ yaitu:

1. Menggalakkan pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam segala tingkat pendidikan, agar siswa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, jujur, kritis, peduli dan bertanggung jawab.
2. Mendorong akademisi untuk melakukan penelitian tentang korupsi dari berbagai perspektif.
3. Melakukan sosialisasi secara berkala tentang korupsi dalam forum-forum seminar atau pelatihan-pelatihan, tidak hanya di lingkungan perkotaan tetapi juga di lingkungan pedesaan.
4. Dalam lingkungan keluarga, pendidikan antikorupsi dapat dilakukan dengan menumbuhkan kembangkan sikap saling menghargai antar sesama,

⁶ Siroj Malthuf, Marjuki Ismail. *Pendidikan AntiKorupsi*. Malang: Media Madani, 2018.

menghindari sikap mengambil hak anggota keluarga tanpa seizinnya, berkata dan berperilaku jujur, menumbuhkan rasa bangga atas hasil usaha sendiri sekalipun hasilnya kecil.

5. Menanamkan pola hidup sederhana kepada semua elemen masyarakat, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat.

Dengan mempertimbangkan permasalahan pada mitra dan kepakaran tim pengabdian maka solusi yang kami tawarkan adalah dengan memberikan penyuluhan kepada siswa kelas VI SD Negeri Gedongkiwo Yogyakarta tentang pendidikan anti korupsi. Penyuluhan pendidikan anti korupsi sebagai salah satu upaya dalam menanamkan pemahaman dasar tentang nilai-nilai kejujuran serta norma-norma pancasila guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Setelah menonton film tentang korupsi dan diberikan pemaparan dan penyuluhan, maka siswa akan dilibatkan secara aktif yaitu diberikan kesempatan untuk berdiskusi, kemudian siswa dapat mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang ada di dalam film tersebut, sehingga dapat diperoleh solusi untuk memecahkan masalah dan kendala-kendala yang dihadapi.

Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini harapannya akan membuat para siswa termotivasi untuk menjadi lebih baik, dapat terbentuknya nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keberanian, kegigihan, kepedulian, disiplin, kreatif, kebersamaan, kesederhanaan sehingga semakin banyak siswa yang terpuji di lingkungan sekolah, sehingga akan menghasilkan adanya penyamaan persepsi di kalangan para siswa bahwa tugas pencegahan korupsi tidak saja merupakan tanggungjawab pemerintah saja akan tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama.

Pada pengabdian masyarakat ini akan diajarkan kepada para siswa dan siswi cara-cara menjadi agen perubahan minimal dalam lingkungan sekolah dan keluarga melalui media film dan pengabdian masyarakat ini akan ditekankan pada simulasi-simulasi pada sifat kejujuran, sehingga dapat terbentuknya komunitas siswa anti korupsi di tingkat sekolah.

Pencegahan tindak pidana korupsi harus dimulai sejak usia dini, untuk itu pelajar menjadi subjek pendidikan budaya anti korupsi, apabila masyarakat

Indonesia bebas korupsi maka pembangunan bangsa menjadi lebih baik. Oleh karena itu kegiatan pencegahan dengan melibatkan siswa harus lebih masif lagi dilakukan.

b. Target Luaran

Target luaran dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut.

1. Penyuluhan pendidikan antikorupsi melalui media film “Sahabat Pemberani”
2. Naskah publikasi ilmiah pada Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM) berkualitas tinggi
3. Presentasi hasil PKM Tematik (Perorangan)



BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM

A. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan Pendidikan Antikorupsi yang dilaksanakan di SD Negeri Gedongkiwo Yogyakarta dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 pada pukul 09.00-12.00 WIB. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut adalah siswa kelas VI yang berjumlah 30 orang peserta.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*), sehingga penanganannya juga harus dilakukan dengan usaha yang luar biasa. Di era reformasi ini, korupsi semakin merajalela dengan melibatkan pelaku yang beragam, mulai dari pusat sampai paa level terendah. Dari data *Transparency International* (TI), Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2017 berada di skor 37 dan berada pada peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei secara global. Menyikapi fenomena korupsi yang makin marak terjadi, dunia pendidikan pun mulai melakukan pembenahan-pembenahan untuk menjawab tantangan derasnya arus korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perubahan melalui pendiidkan antikorupsi pada tingkat pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi.

Penyebaran pendidikan antikorupsi ini pun akan dilakukan secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, pendidikan karakter antikorupsi tidak berdiri sendiri sebagai sebuah mata pelajaran, tetapi dengan memberikan penguatan pada masing-masing mata pelajaran yang selama ini dinilai sudah mulai kendur. Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 dengan mitra 30 (tiga puluh) orang siswa kelas VI SD Negeri Gedongkiwo Yogyakarta.

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan ramah tamah tim pengabdian dengan kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan para siswa. Kegiatan diawali dengan sepatah kata dari Kepala Sekolah dan selanjutnya kegiatan pengabdian dibuka oleh Ketua Pengabdi sendiri dan acara selanjutnya materi penyuluhan pendidikan antikorupsi. Sesi pertama diawali dengan melakukan elaborasi pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap konsep korupsi itu sendiri. Sesi kedua dilanjutkan dengan simulasi dan pemutaran Film tentang kasus-kasus korupsi yang sering

dijumpai di lingkungan sekolah. Sesi berikutnya mengulas mengenai indikator korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesi terakhir penyampaian pandangan dari kelompok siswa mengenai kasus korupsi yang mereka jumpai di lingkungan mereka sendiri yang dilanjutkan dengan pembentukan komunitas anti korupsi. Berikut penjabaran setiap sesi pengabdian:

1. Pengetahuan Siswa Tentang Korupsi

Sesi ini difasilitasi oleh Rian Okta Rahmana, S.Pd selaku guru SD kelas VI SD Negeri Gedongkiwo Yogyakarta. Dalam sesi ini siswa diminta untuk menjelaskan sesuai dengan pengetahuan mereka mengenai konsep korupsi itu sendiri dan sekaligus juga mengemukakan kasus-kasus yang terindikasi korupsi yang mereka jumpai dalam kehidupan mereka sehari-hari, khususnya dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Dari 27 orang yang dimintai pendapat mengenai konsep korupsi hampir 90 % mereka sudah bisa dengan jelas menyebutkan mengenai pengertian korupsi sebagai sebuah kejahatan dengan mengambil sesuatu yang bukan hak kita dan merugikan Negara maupun sekolah.

Siswa menyebutkan contoh-contoh perilaku korupsi yang mereka jumpai di lingkungan keluarga dan sekolah mereka. Seperti meminta uang buku kepada orang tua yang melebihi harga dari buku itu sendiri. Ada juga yang mengemukakan mengenai adanya teman-teman mereka yang berbelanja di kantin sekolah tetapi tidak membayar sesuai dengan yang diambarnya. Dari beberapa kasus yang mereka kemukakan di atas dapat diambil kesimpulan para peserta pelatihan sudah memahami dengan baik konsep korupsi secara sederhana dan praktek-praktek korupsi yang bisa diidentifikasi di lingkungan siswa itu sendiri.

Simulasi dan Pemutaran Film Bertemakan Korupsi Sesi berikutnya difasilitasi oleh Esty Rahmayanti, M.Pd. Pada sesi ini diputar beberapa film pendek mengenai korupsi di dunia pendidikan, film pendek ini merupakan film yang didapatkan dari situs KPK. Pada sesi ini para peserta dibagi dalam beberapa kelompok-kelompok kecil dan masing-masing kelompok diminta untuk membuat kesimpulan dimana praktek korupsi tersebut terjadi dan apa indikator kenapa terjadi praktek korupsi tersebut. Peserta umumnya bisa menjelaskan indikator korupsi yang ditampilkan dalam film tersebut dan mereka juga bisa memberikan

solusi agar praktek tersebut bisa diminimalisir. Indikator Korupsi dari KPK Sesi ini diawali dengan pemaparan materi mengenai konsep korupsi, indikator dan solusi kedepannya.

Adapun fasilitator dalam sesi ini adalah Ibu Esty Rahmayanti, M.Pd. Pada sesi ini dipaparkan mengenai konsep korupsi, indikator korupsi, pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depannya. Siswa dibagi kembali dalam beberapa kelompok kecil, di mana dalam kelompok kecil tersebut mereka mendiskusikan konsep korupsi, indikator dan langkah-langkah dalam pencegahan korupsi, khususnya dilingkungan sekolah sendiri.

Pandangan Siswa tentang Korupsi dan Pembentukan Komunitas Anti Korupsi Sesi ini dipandu oleh Pak Rian Okta Rahmana dan Ibu Esty Rahmayanti. Setiap siswa diminta pandangannya mengenai konsep korupsi dan apa langkah-langkah pencegahannya ke depan, khususnya yang terjadi dilingkungan sekolah. Pada sesi ini siswa sepakat untuk menjadi agen dalam pencegahan korupsi di sekolah mereka dan mereka sepakat untuk membentuk komunitas anti korupsi di sekolah. Mereka sepakat akan menjadi penggerak/motivator dan agen perubahan untuk berperilaku jujur, amanah dan tidak korup. Acara ditutup dengan doa dan sesi dokumentasi.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan antikorupsi yang telah dilakukan oleh tim pengabdian merupakan sebuah bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mencegah Tindak Pidana Korupsi sejak dini khususnya pada kalangan anak-anak dalam lingkungan pendidikan sekolah dasar (SD). Melihat Korupsi sebagai isu nasional merupakan persoalan bangsa harus segera diberantas. Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara represif maupun preventif. Upaya pencegahan korupsi bisa dilakukan sedini mungkin melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, penyuluhan mengenai korupsi. Pendidikan anti korupsi di sekolah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman para siswa mengenai korupsi dan dampaknya terhadap aspek kehidupan, sehingga diharapkan nantinya akan menjadi generasi yang anti korupsi.

Beberapa isu yang menjadi sebuah acuan dilakukannya penyuluhan pendidikan antikorupsi di SD Negeri Gedongkiwo Yogyakarta diantaranya :

1. Plagiat/Copy-Paste dalam penugasan

2. Mencontek
3. Gratifikasi ke Guru
4. Memalsukan kuitansi dan cap kegiatan
5. Korupsi waktu oleh Guru dan Siswa

Berdasarkan hasil dari kuisioner yang diberikan kepada 30 peserta sebagai tolok ukur sejauh mana siswa-siswi memahami korupsi maka hasilnya adalah 100% siswa-siswi mengetahui pengertian dari korupsi secara umum, rata-rata siswa-siswi hanya mengetahui korupsi secara umum yakni sebagai suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan Negara ataupun orang lain untuk keuntungan pribadi, namun hanya 15% dari siswa-siswi tersebut yang mengetahui korupsi secara spesifik seperti bentuk-bentuk dari korupsi itu sendiri.

Bentuk-bentuk korupsi dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Penyuapan adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima Korupsi Penyuapan Penggelapan Gratifikasi Contoh Penyuapan : Memberikan uang atau barang kepada guru agar mendapatkan nilai yang maksimal Memberikan uang atau barang kepada instansi sekolah agar dilancarkan masuk kesekolah tersebut.
2. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Contoh penggelapan : Bendahara meminta uang kas, dan ternyata uang kas tersebut di buat untuk pribadi.
3. Gratifikasi, Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Contoh Gratifikasi : Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu, Hadiah/sumbangan rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya.

Pemahaman tersebut kemudian ditanamkan kepada siswa-siswa SD Negeri Gedongkiwo Yogyakarta sehingga secara tidak langsung dapat menanamkan tindakan anti korupsi sejak dini serta dapat mencegah perbuatan korupsi sejak dini, dimana peran generasi muda haruslah memiliki rasa cinta tanah air serta tertanamnya nilai-nilai kejujuran yang luhur yang dapat membawa pada perubahan era bebas korupsi. Hasil dari Kuisioner yang diberikan tersebut membuktikan bahwa siswa-siswi SD Negeri Gedongkiwo Yogyakarta telah memahami arti dari Korupsi.

2. Hasil/Respon Siswa terhadap Kegiatan Penyuluhan

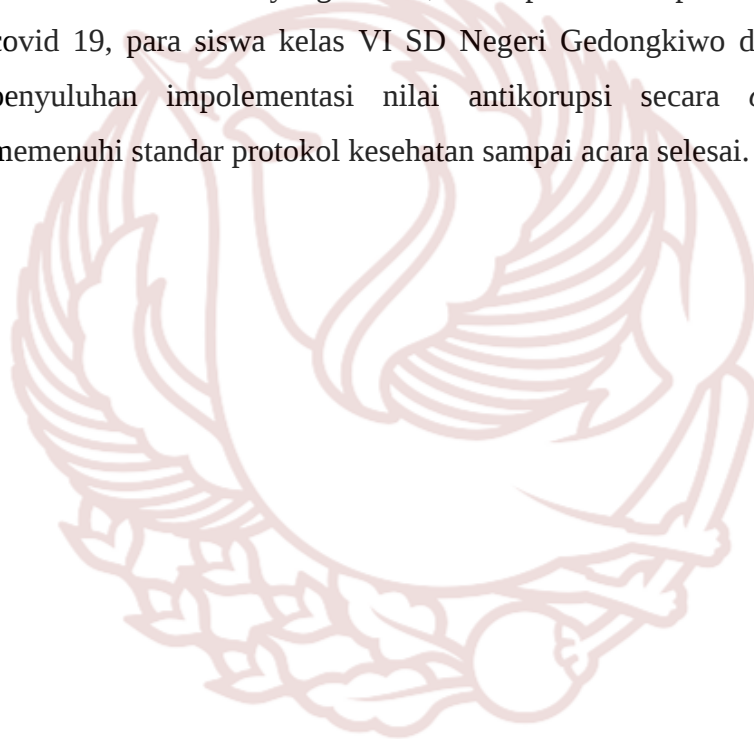
Hasil kegiatan penyuluhan dapat diukur melalui diskusi dan tes yakni sebelum diberikan materi penyuluhan melalui pretest dan sesudah penjelasan materi dan tanya jawaban diberikan posttest dengan *google form* sebagai berikut:

- a) Siswa SD Negeri Gedongkiwo sebelum dilaksanakan penyuluhan diberikan waktu untuk menjawab 15 soal pilihan ganda melalui link pretest yang ada di *google form*. Dari 27 orang siswa yang memperoleh nilai: 25 dua orang, nilai 30 tiga orang, nilai 35 seorang, nilai 40 dua orang, nilai 45 tiga orang, nilai 50 lima orang, nilai 55 empat orang, nilai 60 empat orang dan yang mendapat nilai 80 seorang. Kemudian hasil tesnya rerata diperoleh nilai 47,2.
- b) Siswa SD Negeri Gedongkiwo pada awal penyuluhan ditanya tentang pengertian korupsi dan perilaku korupsi sebagian diantara mereka belum mengetahui. Selanjutnya pada saat proses penyuluhan ada yang bertanya tentang bedanya antara suap-menyuap dan gratifikasi kemudian dijawab melalui slide yang sedang proses ditayangkan. Setelah selesai penjelasan materi dan ditayangkan film pendek tentang antikorupsi mereka aktif mengikuti jalanya pemutaran film tersebut. Hal ini menunjukkan mereka serius mengikuti penyuluhan materi implementasi nilai antikorupsi.
- c) Siswa SD Negeri Gedongkiwo setelah mengikuti penyuluhan materi nilai antikorupsi dan ditayangkan video/film pendek antikorupsi, serta tanya jawab selanjutnya diberikan waktu untuk menjawab 15 soal pilihan ganda yang ada di link posttest yang ada di *google form* sebagaimana digambarkan pada distribusi poin total di bawah ini. Dari 27 orang siswa yang memperoleh nilai: 30 seorang, nilai 35 dua orang, nilai 45 seorang, nilai 50 seorang,

nilai 55 dua orang, nilai 60 dua orang, nilai 65 tiga orang, nilai 70 enam orang, 80 seorang, nilai 90 dua orang, nilai 95 seorang dan nilai 100 tiga orang siswa. Kemudian hasilnya rerata diperoleh nilai 67,69. Dalam hal ini berarti ada peningkatan pengetahuan tentang nilai antikorupsi sebesar 20,49 poin. Peningkatan nilai dari nilai Pretest ke Posttest sebesar 20,49 poin.

3. Kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan

- a. Kesulitan dapat teratasi karena seringnya komunikasi dan koordinasi dengan pihak pimpinan LPPM, Fakultas, dan mahasiswa dan lembaga SD Negeri Gedongkiwo.
- b. Tidak ada hambatan yang berarti, walaupun masih pada masa pandemic covid 19, para siswa kelas VI SD Negeri Gedongkiwo dapat mengikuti penyuluhan implementasi nilai antikorupsi secara *offline* dengan memenuhi standar protokol kesehatan sampai acara selesai.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang penanganannya juga diperlukan tindakan yang luar biasa juga. Kurikulum pencegahan korupsi dalam bentuk Pendidikan Karakter Anti Korupsi untuk dapat di implementasikan sebagai sebuah mata pelajaran wajib yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisa tingkat pemahaman dan kepekaan siswa/i SD Negeri Gedongkiwo terkait korupsi adalah mayoritas siswa/i SD Negeri Gedongkiwo telah memahami arti dari korupsi secara umum namun tidak semua siswa/i SD Negeri peka terhadap praktek korupsi yang terjadi dalam lingkungan sekolah dan berkomitmen untuk memberantas korupsi. Tidak terlepas dari itu, salah satu persoalan yang timbul pula adalah bahwa pandangan siswa/i SD Negeri Gedongkiwo yang melihat sekolah kurang tegas dalam menangani kasus korupsi yang terjadi di lingkungannya. Disamping itu, dalam kaitannya dengan menanamkan budaya anti korupsi sejak dini, upaya preventif harus terus dilakukan, salah satunya dengan mengadakan penyuluhan dan *sharing* terkait dengan praktek korupsi yang terjadi dalam lingkungan sekolah serta memberikan solusi terkait cara menyelesaikan persoalan tersebut.

B. Saran

1. Perguruan Tinggi diharapkan berperan aktif dalam memberikan pengetahuan pendidikan karakter anti korupsi bagi siswa SD.
2. Bagi pemangku kebijakan agar mengeluarkan peraturan untuk Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dimasukan sebagai salah satu mata pelajaran wajib mulai dari SD hingga perguruan tinggi, sedangkan pengajarnya adalah guru-guru yang telah diberi training bagaimana mengajarkan pendidikan karakter antikorupsi. Penyebaran pendidikan antikorupsi ini pun akan dilakukan secara bertahap
3. Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas maka beberapa saran yang diberikan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan persoalan tersebut ialah siswa/i harus lebih peka dan berani memberikan laporan terkait denngan

dugaan praktek tindakan korupsi yang dilakukan di lingkungan sekolah sehingga dapat meningkatkan intensitas praktek korupsi yang terjadi di lingkungan sekolah. Dalam kaitannya dengan sekolah, maka sudah sepatutnya sekolah memberikan perhatian khusus kepada para pihak yang melakukan praktek korupsi di lingkungan sekolah dan lebih menegaskan sanksi yang dijatuhkan kepada siswa/i SD Negeri Gedongkiwo yang terbukti melakukan tindakan korupsi sesuai dengan laporan yang diberikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Chablullah, Wibisono. 2011. *Memberantas Korupsi dari dalam Diri*. Jakarta: Al Wasat Publishing House.
- Ermansjah Djaja. 2013. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad Nurdin. 2014. *Pendidikan Antikorupsi (strategi internalisasi nilai-nilai Islami dalam menumbuhkan kesadaran antikorupsi di sekolah)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Siroj Malthuf, Marjuki Ismail. 2018. *Pendidikan AntiKorupsi*. Malang: Media Madani.
- Wibowo, Agus. 2013. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Anti korupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

SOAL PENYULUHAN “IMPLEMENTASI NILAI ANTIKORUPSI”
SISWA KELAS VI SD NEGERI GEDONGKIWO

Pilihlah jawaban yang benar dengan cara silang (X)

1. Korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu:
 - a. Corruptio
 - b. Coruptio
 - c. Corruption
 - d. Corruptio
2. Korup menurut kamus besar bahasa Indonesia maknanya:
 - a. Busuk
 - b. Palsu
 - c. Mengambil
 - d. Memungut
3. Makna Sederhana sebagai salah satu nilai Antikorupsi, adalah:
 - a. Bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan
 - b. Bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu seadanya, tidak berlebih-lebihan
 - c. Bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu apa adanya, tidak berlebih-lebihan
 - d. Bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu yang ada, tidak berlebih-lebihan
4. Korupsi adalah kejahatan luar biasa dalam istilah lain disebut:
 - a. extra ordinary crime
 - b. extra crime ordinary
 - c. ordinary extra crime
 - d. extra out of ordinary crime
5. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah tindak pidana korupsi:
 - a. kerugian keungan Negara
 - b. kerugian keuangan salah satu Negara

- c. kehilangan keuangan Negara
 - d. kehilangan keuangan salah satu Negara.
6. Memberi hadiah kepada guru setelah kenaikan kelas, adalah termasuk jenis tindak pidana korupsi:
- a. Penyuapan
 - b. Pemerasan
 - c. Gratifikasi
 - d. Perbuatan curang
7. Salah satu sebab korupsi dari faktor internal sangat ditentukan oleh:
- a. Sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia
 - b. Tidak punya pekerjaan
 - c. Banyaknya pengangguran
 - d. Menipu dirinya sendiri
8. Penyebab korupsi dari faktor eksternal antara lain, adalah:
- a. Politik, hukum, ekonomi, organisasi
 - b. Terpaksa korupsi karena memiliki jabatan strategis
 - c. Korupsi karena untuk mengembalikan modal politik
 - d. Korupsi secara berjamaah
9. Nilai-nilai Antikorupsi, salah satunya adalah:
- a. Prestasi
 - b. Motivasi
 - c. Inovasi
 - d. Peduli
10. Tanggung jawab adalah:
- a. Sikap dan perilaku semua orang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama.
 - b. Sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara maupun agama.

- c. Sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama.
 - d. Sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, nusa, bangsa, negara maupun agama.
11. Salah satu dampak korupsi adalah:
- a. Perekonomian Negara menjadi lancar dan pembangunan merata.
 - b. Pembangunan sektor migas berdampak harga BBM menjadi lebih murah
 - c. Terjadi kesenjangan kerugian keuangan negara yang masif
 - d. Terjadinya kemakmuran Negara yang masif.
12. Makna Adil sebagai nilai antikorupsi, adalah:
- a. Tidak berat sebelah, tidak memihak pada siapapun. Adil juga perlakuan yang sama untuk semua tanpa membedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu.
 - b. Tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga perlakuan yang sama untuk semua tanpa membedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu.
 - c. Tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga perlakuan yang sama untuk seorang tanpa membedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu.
 - d. Tidak berat sebelah, Adil juga perlakuan yang sama untuk semua tanpa membedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu.
13. Salah satu peran siswa dalam mencegah terjadinya korupsi adalah:
- a. Terlambat saat ujian dalam mengawasi ujian
 - b. Mengerjakan soal ujian sesuai tata tertib ujian
 - c. Tukar-menukar lembar jawaban ujian kepada temanya
 - d. Bercakap-cakap saat ujian berlangsung
14. Salah satu peran serta siswa dalam memberantas terjadinya korupsi:
- a. Menyalahgunakan uang SPP
 - b. Tidak melakukan plagiat
 - c. Tukar-menukar lembar jawaban ujian kepada temanya

- d. Bercakap-cakap saat ujian berlangsung
- 15. Nilai-nilai Antikorupsi sebanyak 9 (Sembilan) macam nilai yang disingkat:
 - a. JUPE MANDI TANGKER KENABEDIL
 - b. JUVE MANDI TANGKER KENABEDIL
 - c. JUPE MANDI TANGKER KEBEDIL
 - d. JUVE MANDI TANGKER KEBEDIL

KUNCI JAWABAN SOAL PENYULUHAN “IMPLEMENTASI NILAI ANTI KORUPSI” SISWA KELAS VI SD NEGERI GEDONGKIWO

- 1. a
- 2. b
- 3. a
- 4. a
- 5. a
- 6. b
- 7. a
- 8. a
- 9. c
- 10. c
- 11. b
- 12. a
- 13. b
- 14. b
- 15. c



LAMPIRAN FOTO-FOTO KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT





MATERI PENYULUHAN





2
*
TUN BERSIH SIFAT POKOKAN

3

4

5

6
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

3

4

5

6
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

6

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

7

APA ITU KORUPSI?

KORUPSI

8

DEFINISI KORUPSI

KORUPSI adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

(Subekti dan Tjitrosoedibio)

9

PENGERTIAN KORUPSI

PENGERTIAN KORUPSI

corruptie adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

(Subekti dan Tjitrosoedibio)

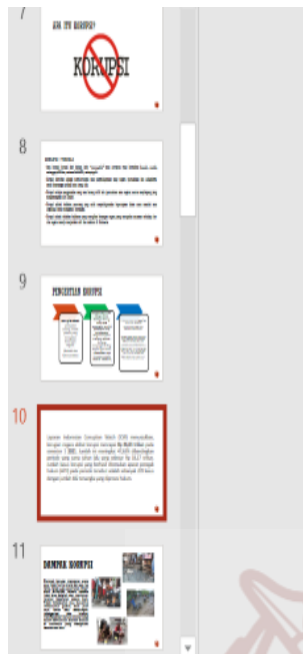
menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusutan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

(Baharuddin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers)

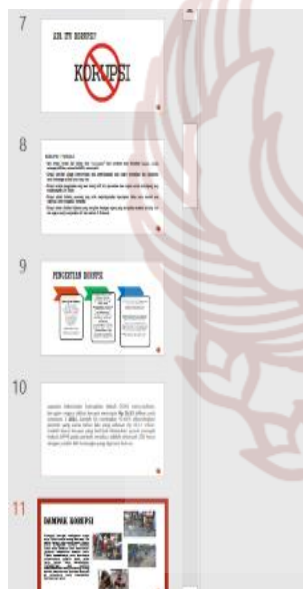
Di Malaysia dipakai kata "resuah" dari bahasa Arab "risywah", menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya korupsi.

Risywah (suap) secara terminologi berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Semua ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan pemutusan hukum, perbuatan ini termasuk dosa.

30



Laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan, kerugian negara akibat korupsi mencapai **Rp 26,83 triliun** pada semester 1 **2021**. Jumlah ini meningkat 47,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 18,17 triliun. Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditemukan aparat penegak hukum (APH) pada periode tersebut adalah sebanyak 209 kasus dengan jumlah 482 tersangka yang diproses hukum.



DAMPAK KORUPSI

Dampak korupsi mengenai siapa saja, tidak hanya orang dewasa, tua renta, tetapi juga anak-anak. Anak-anak dirugikan karena mereka tidak bisa sekolah dan menikmati layanan kesehatan secara baik. Tidak tersedianya atau buruknya infrastruktur publik, baik jalan raya, taman kota, bendungan, transportasi, dan lainnya, menyebabkan banyak orang hidup dalam kemiskinan, bahkan banyak di antaranya yang mengalami kemiskinan akut.



10

KONSTRUKSI KAWASAN PERKOTAAN

11

KONSTRUKSI KAWASAN PERKOTAAN

12

KONSTRUKSI KAWASAN PERKOTAAN

13

KONSTRUKSI KAWASAN PERKOTAAN

14

KONSTRUKSI KAWASAN PERKOTAAN

15

KONSTRUKSI KAWASAN PERKOTAAN

Sedangkan Faktor Eksternal adalah situasi lingkungan dan adanya peluang atau kesempatan yang sangat mendukung untuk melakukan korupsi.

- 32

22

23

24

25

26

DATANG TERLAMBAT KE SEKOLAH



19

20

21

22

BOLOS SEKOLAH



22

23

24

25

26

24

25

26

27

28

MENCONTEK





NILAI-NILAI ANTIKORUPSI



25

26

27

28

29

28

29

30

31

KEJUJURAN

- Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan hati, dan kelurusan hati (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 479).
- Kejujuran adalah mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang dilakukan, dialami dan dirasakan (Sutrisno dan Sasongko, t.th.: 40).
- Kejujuran merupakan dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral (Suseno, 1987: 142).
- Tanpa kejujuran, manusia tidak dapat maju selangkah pun, karena ia tidak berani menjadi diri sendiri. Tanpa kejujuran, keutamaan-keutamaan moral lainnya akan kehilangan nilainya.
- Kejujuran dimulai dari lingkungan yang terdekat, yakni dari diri sendiri, keluarga, kelas, sekolah dan tempat tinggal. Ibarat bola salju, pribadi jujur akan menggelinding terus membentuk keluarga yang jujur. Keluarga yang jujur menggelinding terus membentuk lingkungan tempat tinggal terdekat yang jujur.

BAB VII
JADWAL PELAKSANAAN DAN BIAYA

A. Jadwal Pelaksanaan

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6						
1.	Survey dan sosialisasi program												
2.	Administrasi dan perijinan												
3.	Pelaksanaan persiapan PKM												
4.	Observasi												
5.	Kegiatan penyuluhan anti korupsi												
6.	Tahapan evaluasi												
7.	Penyusunan laporan dan artikel ilmiah												
8.	Pengiriman laporan PKM												
9.	Publikasi hasil pengabdian masyarakat												

B. Biaya Pekerjaan

No	Jenis Pengeluaran	Pelaksanaan
1.	Honor, Gaji, dan Upah	Rp 2.960.000,00
2.	Bahan Habis Pakai dan Peralatan Penunjang	Rp 3.240.000,00
3.	Biaya Perjalanan, Konsumsi dan Akomodasi	Rp 2.500.000,00
4.	Biaya Lain-lain : Publikasi, Seminar, dll	Rp 1.300.000,00
	Total	Rp10.000.000,00

Justifikasi Anggaran Pengabdian Masyarakat

A. Honorarium

No.	Honor	Kuan	Honor/Jam/Hari (Rp)	Wkt Jam/Mgg	Mgg	DIPA
1.	Guru	1	100.000,00	2	5	500.000,00
2.	Siswa	56	35.000,00	2	3	1.960.000,00
4.	Mahasiswa	1	100.000	8	5	500.000,00
Subtotal						2.960.000,00

B. Bahan Habis Pakai dan Peralatan Penunjang

No.	Material	Justifikasi Pemakaian	Kuan	Sat	Harga Sat (Rp)	DIPA
1.	Kertas HVS	Untuk penyusunan laporan, keperluan pencetakan dan penggandaan laporan.	10	rim	50.000,00	500.000,00
2.	Tinta printer hitam & warna	Untuk penyusunan laporan.	3	buah	150.000,00	450.000,00
3.	Fotocopy & penjilidan laporan	penggandaan proposal dan laporan	4	Paket	100.000,00	400.000,00
4.	Flash disk 16 GB	Alat penunjang penyimpanan data bagi ketua dan anggota	2	buah	100.000,00	200.000,00
5.	Bullpoint	Alat penunjang pencatatan data	2	Lusin	50.000,00	100.000,00
6.	Buku, Block note	Bahan pengembangan instrument dan	10	buah	10.000,00	100.000,00

		validasi data				
7.	Kertas Folio bergaris	Administrasi, pengumpulan data, analisis data penelitian	2	rim	100.000,00	200.000,00
8.	Sewa printer	Alat penunjang mencetak proposal dan laporan penelitian	1	buah	490.000,00	490.000,00
12.	Internet	Mencari data-data literatur	5	bulan	100.000,00	500.000,00
13.	Banner	Memberikan informasi tentang kegiatan.	1	buah	300.000,00	300.000,00
Subtotal						3.240.000,00

C. Perjalanan

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuan	Personil	Harga Sat (Rp)	DIPA
Solo dalam kota (PP)	Koordinasi Penelitian	3	1	100.000,00	300.000,00
Solo dalam kota (PP)	Administrasi dan perijinan	1	1	200.000,00	200.000,00
Solo-Yogyakarta (PP)	Survey	2	1	200.000,00	400.000,00
Solo-Yogyakarta (PP)	Pelaksanaan persiapan penelitian	3	1	100.000,00	300.000,00
Solo-Yogyakarta (PP)	Observasi	2	1	200.000,00	400.000,00
Solo-	Pengambilan	3	1	150.000,00	450.000,00

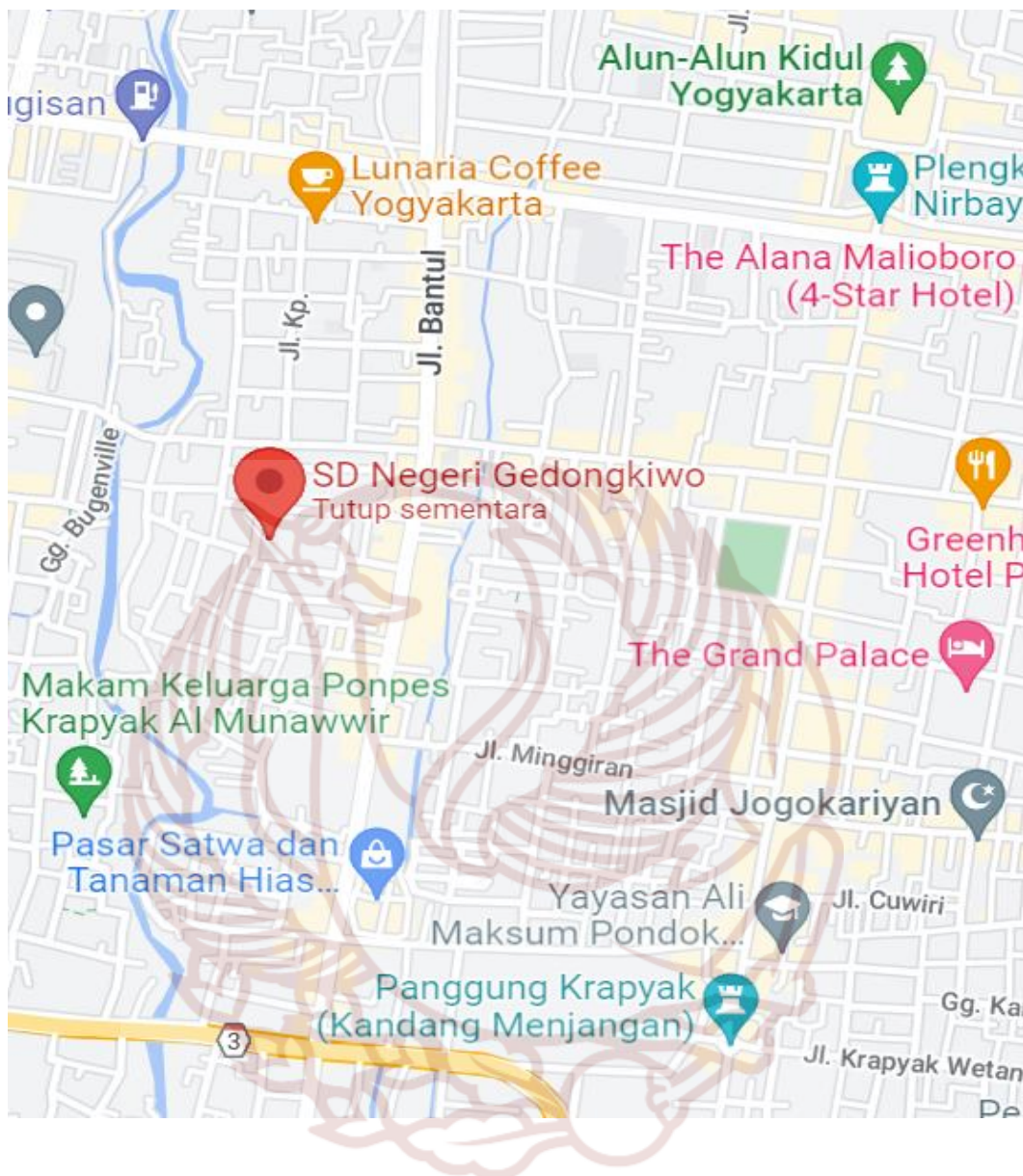
Yogyakarta (PP)	data di lapangan				
Solo-Yogyakarta (PP)	Implementasi	3	1	100.000,00	300.000,00
Solo-Yogyakarta (PP)	Evaluasi	1	1	150.000,00	150.000,00
Subtotal					2.500.000,00

D. Biaya Publikasi dan lain-lain

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuan	Sat	Harga Sat (Rp)	DIPA
Pelaporan	Cetak dan Penggandaan	5	Eks	100.000,00	500.000,00
Jurnal	Biaya	1	Edisi	500.000,00	500.000,00
Pengajuan HKI	Biaya Pengajuan Dokumen	1	Paket	300.000,00	300.000,00
Subtotal					1.300.000,00



Lampiran 1. Peta Lokasi Wilayah Mitra



Lampiran 2. Biodata Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Identitas Diri Ketua Pelaksana

1.	Nama	Esty Rahmayanti, S.Pd,.M.Pd
2.	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
3.	Jabatan Struktural	-
4.	NIP	199111142019032022
5.	Akun Sinta	https://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6748518&view=overview

6.	Tempat Tanggal Lahir	Pemalang, 14 November 1991
7.	Alamat Rumah	Griya Tifara Plesungan Blok 1H, Karanganyar
8.	Telepon/HP	089672202536
9.	Alamat Kantor	Jl. Ki Hadjar Dewantara 19 Ketingan, Surakarta
10.	Alamat email	estyrahmayanti1411@gmail.com
11.	Lulusan yang telah dihasilkan	S1:-orang, S2: -orang, S3: -orang
12.	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pendidikan Pancasila 2. Pendidikan Kewarganegaraan 3. Kewirausahaan 4. Manajemen Usaha & Digitalpreneur 5. Wawasan Budaya Nusantara 6. Etika Profesi TV & HKI

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Yogyakarta	Universitas Negeri Yogyakarta
Bidang ilmu	Pendidikan Kewarganegaraan & Hukum	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Tanggal Masuk-Lulus	2009-2014	2015-2018
Judul Skripsi/Tesis	Kinerja Guru Pendidikan Kewarganegaraan Pasca Sertifikasi (Pedagogik dan Profesional)	Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pembelajaran Pendidikan Politik SMA di Yogyakarta
Nama Pembimbing	Muchson AR, M.Pd	Dr. Suharno, M.Pd

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul	Pendanaan	
			Sumber Dana	Jumlah Dana (Rp)
1.	2021	Implementasi Pendidikan Nilai Nasionalisme melalui Media Film dalam Pembelajaran PPKn.	DIPA ISI Surakarta	10.000.000
2.				
3.				

D. Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul	Pendanaan	
			Sumber Dana	Jumlah Dana (Rp)
1.	2021	Promosi dan Pengenalan Potensi Desa melalui Media Online di Kelurahan Plosorejo Kec. Matesih Kab. Karanganyar	DIPA ISI Surakarta	10.000.000
2.				
3.				

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul	Volume	Nama Jurnal
1.				
2.				
3.				

F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral pada pertemuan/seminar ilmiah dalam 5 Tahun terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	The 3 rd International Conference on Current Issues In Education	<i>The Role of teachers in teaching PPKN as political education to beginner voters in senior high school of Sleman Regency.</i>	23 Juli 2018 di Eastparc Hotel Yogyakarta
2.	Konferensi Nasional Kewarganegaraan III FKIP UAD	Penerapan <i>problem based learning</i> dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik padan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas XI SMA.	11 Novemeber 2017 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
3.	Seminar Nasional Kewarganegaraan UAD 2	Penguatan literasi digital untuk membentuk karakter kewarganegaraan digital melalui Pendidikan Kewarganegaraan	29 Juni 2020 di UAD Yogyakarta
4.	Webinar Nasional : Seminar virtual Pendidikan Kewarganegaraan 2020	Penguatan wawasan global warga negara melalui PPKn di Era Disrupsi	4 Juli 2020 di UNS Surakarta

G. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Antologi Pandemi dalam memori	2020	240 Halaman	Prokreatif Media
2.	Antologi Cerita dari Rumah	2020	200 Halaman	Marsua Media

3.	Antologi Memeluk Cahaya	2021	162 Halaman	Diandra Kreatif/Mirra Buana Media
4.	Antologi Di Rumah Aja	2020	267 Halaman	Nulis yuk

H. Pengalaman Perolehan HaKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HaKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Implementasi Pendidikan Nilai Nasionalisme melalui Media Film dalam Pembelajaran PPKn.	2021	Laporan Penelitian	000292235

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah diterapkan	Tahun	Tempat penerapan	Respons Masyarakat
1.				
2.				
3.				

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau instansi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.			
2.			
3.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik (Perseorangan) Surakarta.

Surakarta, 20 Mei 2022

Pelaksana



Esty Rahmayanti, S.Pd., M.Pd.

NIP. 199111142019032022



Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Uraian Pembagian Tugas

No	Nama/NIDN/Instansi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/Mgg)	Uraian Tugas
1.	Esty Rahmayanti, S.Pd., M.Pd. NIDN 0014119105	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	8 Jam/minggu	Koordinator tim dan pelaksana dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan hasil seminar, penyusunan artikel ilmiah dan pengajuan HKI. Narasumber penyuluhan, Ketua tim Pembahas Refleksi.
2.	Sekar Fazhari NIM 191481002	Film dan Televisi	8 jam/minggu	Pendamping penyuluhan Pendidikan antikorupsi.

Lampiran Pernyataan Kerja sama

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA DALAM
PELAKSANAAN PKM TEMATIK (PERORANGAN)**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Tunas Melati, S.Pd.
Jabatan di Kelompok : Kepala Sekolah
Nama Kelompok : SD Negeri Gedongkiwo
Bidang : Pendidikan
Alamat : Jalan Bantul, Gang Tawang Sari, Yogyakarta.

Dengan ini menyatakan **Bersedia untuk Bekerjasama** dengan pelaksana kegiatan **Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik (Perorangan)**

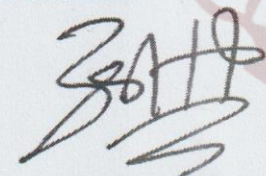
Nama Pelaksana : Esty Rahmayanti, S.Pd., M.Pd.
Perguruan Tinggi : ISI Surakarta

Guna menerapkan Pengabdian Masyarakat yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pelaksana dan pimpinan mitra tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 17 Mei 2022

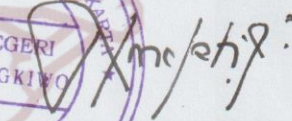
Pelaksana



Esty Rahmayanti, S.Pd., M.Pd.
NIP 199111142019032022



Yang menyatakan



Tunas Melati, S.Pd.
NIP 19750212 199802 2 001

Mengetahui,
Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat

Eko Supendi, S.Sn., M.Sn.
NIP 196304071991031002